



KESBANGPOL
PROVINSI LAMPUNG

EVALUASI RENCANA AKSI 2024



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya Dokumen Evaluasi Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan selesai tepat waktu.

Evaluasi Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Semoga dengan tersusunnya Evaluasi Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024.

KEPALA BADAN



Dr. SENEN MUSTAKIM., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680602 199303 1 006

D AFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	I.1
B. Maksud dan Tujuan	I.2
C. Sistematika Penulisan	I.2

BAB II. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024

A. Rencana Strategis	II.1
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	II.4
C. Perjanjian Kinerja	II.6
D. Rencana Aksi Kinerja 2024	II.14
E. Evaluasi Rencana Aksi Kinerja 2024	II.15
F. Realisasi Anggaran	II.16
G. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja.....	II.16
H. Rekomendasi Tindak Lanjut	II.19

BAB III. PENUTUP

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2021-2024
TABEL II.2	Tujuan dan Sasaran Pendukung Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
TABEL II.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024
TABEL II.4	Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024
TABEL II.5	Evaluasi Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Triwulan I (Satu) Tahun 2024
TABEL II.6	Evaluasi Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Triwulan II (Dua) Tahun 2024
TABEL II.7	Evaluasi Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Triwulan III (Tiga) Tahun 2024
TABEL II.8	Evaluasi Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Triwulan IV (Empat) Tahun 2024
TABEL II.9	Realisasi Anggaran Tahun 2024
TABEL II.10	Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Sasaran Tahun 2024
TABEL II.11	Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Program Pendukung Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan-perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat

serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja berdasarkan rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2024;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk memberikan umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya atas capaian kinerja pada Tahun 2024;
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Evaluasi Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.

Bab II Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024

Menyajikan mengenai Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung 2019-2024, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi Kinerja 2024, Evaluasi Rencana Aksi Kinerja 2024, Realisasi Anggaran, Faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja, serta rekomendasi tindak lanjut

Bab III Penutup

Menyajikan kesimpulan atas capaian realisasi kinerja rencana aksi tahun 2024 dan saran perbaikan atas permasalahan dalam pencapaian kinerja.

BAB II

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024

A. RENCANA STRATEGIS

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Daerah Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024. Dengan mendasarkan modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2005-2025 dan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, maka visi dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

Untuk mencapai visi “Rakyat Lampung Berjaya” tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur masa bakti 2019-2024 adalah:

- Misi - 1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai
- Misi - 2 : Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik
- Misi - 3 : Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel
- Misi - 4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah

Misi - 5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan

Misi - 6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama

Dari Misi yang tertuang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mengambil fokus mendukung misi pertama yaitu Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai dengan melaksanakan agenda kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sesuai dengan agenda RPJMD Provinsi Lampung periode 2019-2024 yaitu:

1. Lampung Merawat Indonesia, dengan memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.
2. Lampung menuju bebas narkoba, dengan mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga dan tokoh-tokoh agama.

Dalam melaksanakan misi ke-1 dan agenda kerja tersebut diatas, pokok-pokok program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagai berikut:

1. Melaksanakan upaya untuk memperkokoh penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi

publik dan media masa, serta lembaga dan organisasi terkait.

2. Meningkatkan koordinasi dan dukungan kepada instansi vertikal dan kabupaten/kota dalam mendorong terciptanya kamtibmas dan penegakan hukum.
3. Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat, penyalahgunaan narkoba, radikalisme dan masalah-masalah sosial lainnya.
4. Memperkuat komunikasi antar lembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan hidup antar umat beragama.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sesuai dengan tupoksinya, mengambil fokus dalam membantu mewujudkan Misi ke-1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu: "Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai" dengan cara mewujudkan Provinsi Lampung yang aman dan kondusif serta saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kerangka NKRI. Untuk itu cara pengukuran yang tepat adalah melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung.

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2019- 2024 yaitu: meningkatnya budaya toleransi dan demokrasi masyarakat maka ditetapkan sasaran jangka menengah yaitu meningkatnya harmonisasi sosial dan kerukunan antar umat beragama dengan indikator tujuan/sasaran:

1. Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung.
2. Meningkatnya penduduk yang menggunakan hak pilih di Provinsi Lampung.

Tabel II.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Lampung Tahun 2021-2024**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN			
				2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Keamanan Daerah	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	80	80	87,50	100

		Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	72,25	72,25	72,75	80
--	--	---	--	-------	-------	-------	----

Selain Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat sasaran yang bersifat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Sasaran tersebut adalah: Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan. Capaian kualitas dan kapasitas kelembagaan sangat terkait dengan kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta sarana dan prasarana yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja ASN di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung adalah dengan penerapan absensi elektronika dan penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung. Dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel II.2
Tujuan dan Sasaran Pendukung Jangka Menengah
Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Lampung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN KE -					
				I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Memperkuat kelembagaan Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung sebagai lembaga penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan	Persentase disiplin kehadiran dan kinerja ASN Badan Kesbangpol Daerah pertahun	90%	92%	94%	96%	98%	100%
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran	60%	65%	70%	75%	80%	90%

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pemerintah Provinsi Lampung membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Lampung yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, serta Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang terdapat dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Pencapaian target pada Indikator Kinerja Utama tidak lepas dari program/kegiatan dan alokasi anggaran yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.

Untuk lebih jelasnya Perjanjian Kinerja dengan Program/Kegiatan dan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 secara terinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP.)
1	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Persen	1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		600.000.000
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah		291.805.800
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah		66.411.500
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah		55.523.700

				Sub Kegiatan pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		186.259.000
				2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1.800.000.000
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5	
				Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		9.757.000
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		60.270.500
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		21.497.500
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		57.107.000
				Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka		1.651.368.000
				3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		275.000.000
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2	

				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		200.000.000
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		75.000.000
				4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya		325.000.000
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	2	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		275.000.000
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		50.000.000
2	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	Persen	5 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		600.000.000

				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	4	
				Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		3.609.300
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		266.315.200
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		79.279.900
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		250.795.600

3	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan	Persentase disiplin kehadiran dan kinerja ASN Badan Kesbangpol Daerah per-tahun	Persen	6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		392.697.134.893,78
				Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15.194.300
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		11.176.700
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		12.407.400
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		11.590.600
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		10.962.800
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		11.994.900
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		13.489.600
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		6.687.497.193,78
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		383.895.132.400
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		22.414.000
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		22.176.000
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		24.278.000
				Sub Kegiatan Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		11.684.000

				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		36.000.000
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		12.430.000
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		6.000.000
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		23.858.200
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		27.784.000
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		20.175.400
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material		108.356.000
				Sub Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		794.446.000
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		111.572.000
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		261.228.400
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		368.151.000
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20.460.000

4	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran	Persen	Kegiatan Administrasi Umum	1	
				Perangkat Daerah		
				Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		156.676.000

D. RENCANA AKSI KINERJA 2024

Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 yang dituangkan secara berkala (per bulan atau triwulan). Adapun Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

E. EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA 2024

Adapun Hasil capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 seperti tabel berikut ini:

F. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi.

Adapun Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.9
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	URAIAN	PAGU DANA Rp.	REALISASI Rp.	SALDO Rp.	REALISASI ANGGA- RAN
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA	396.297.134.893,78	395.128.157.215,00	1.168.977.678,78	99,71
I	BELANJA OPERASI	396.140.458.893,78	394.974.807.215,00	1.165.651.678,78	99,71
	Belanja Pegawai	6.687.497.193,78	6.043.069.681,00	644.427.512,78	90,36
	Belanja Barang dan Jasa	5.557.829.300,00	5.036.605.134,00	521.224.166,00	90,62
	Belanja Hibah	383.895.132.400,00	383.895.132.400,00	0	100,00
II	BELANJA MODAL	156.676.000,00	153.350.000,00	3.326.000,00	97,88
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.676.000,00	153.350.000,00	3.326.000,00	97,88

G. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024, tentunya tidak

terlepas daripada faktor pendukung dan faktor penghambat serta faktor intenal dan eksternal terhadap realisasi capaian kinerja yang telah dicapai. Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung berdasarkan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.10

Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Sasaran Tahun 2024

NO	INDIKATOR	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	PENANGGUNG JAWAB
1	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	<ol style="list-style-type: none"> Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung Sudah terbentuknya komponen penanganan konflik sosial dari segi kelembagaan yaitu adanya Tim Pengawas Deteksi Dini, Tim Penanganan Konflik Sosial serta dari unsur unsur <i>Stakeholder</i> terkait 	<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan anggaran Masih belum lengkapnya SDM di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan 	Bidang Bidang dan Sekretariat

2	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam peningkatan penduduk yang menggunakan hak pilih	1. Masih belum lengkapnya SDM di bidang Politik Dalam Negeri	
---	--	--	--	--

Kemudian terdapat beberapa program pendukung yang turut dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, tentunya tidak terlepas daripada faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap realisasi capaian kinerja yang telah dicapai. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat berdasarkan program pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.11
Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Program Pendukung Tahun 2024

NO	PROGRAM	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	PENANGGUNG JAWAB
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Kegiatan yang sifatnya rutin telah terealisasi, seperti pembayaran gaji, jasa komunikasi, penyediaan alat tulis kantor, barang cetak penggandaan, bahan bacaan dan belanja pemeliharaan	1. Keterbatasan anggaran 2. Masih belum lengkapnya sarana dan prasarana	Bidang- Bidang dan Sekretariat

		2. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga tercapai pelayanan yang prima		
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif sehingga realisasi yang sesuai dengan penatausahaan keuangan direalisasikan sesuai jadwal yang telah direncanakan	Keterbatasan anggaran	Bidang Bidang dan Sekretariat

H. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Sehubungan dengan adanya permasalahan/faktor penghambat yang masih ditemui pada pencapaian rencana aksi terhadap pencapaian sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024, maka direkomendasikan untuk Sekretariat dan Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung untuk:

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dengan memperbarui cara kerja, misalnya pelaksanaan

instruksi dan pengawasan serta evaluasi intern melalui daring (WA, email) dan permintaan data maupun penerbitan laporan dalam bentuk *softcopy*.

- b. Memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan/sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan lainnya sehingga adanya kelengkapan dan keterkaitan antar kegiatan yang memerlukan *cross cutting* dalam Instruksi pelaksanaan maupun evaluasinya.
- c. Tetap dilaksanakan pengawasan yang efektif secara berjenjang guna memperlancar proses kegiatan.

**RENCANA AKSI BADAN KESBANG DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				AKSI				JADWAL PELAKSANAAN			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	AKSI KEGIATAN	I	II	III	IV			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Presentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	I II III IV	20% 40% 60% 87.5%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	I II III IV	10% 25% 50% 75%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah										
									Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	I II III IV	3 Dok 4 dok 4 dok 4 dok	1 2 3 4	Renja 2024 Rencana Aksi 2024 KUA PPAS 2024 Anggaran Reponsif Gender (ARG) Tahun 2024	v					
									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	I II III IV	2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok	1	RKA Tahun 2024	v					
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	I II III IV	- 1 dok 1 dok 1 dok	1	RKA Perubahan Tahun 2024		v				
									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD	I II III IV	1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	1	DPA Tahun 2024	v					
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	I II III IV	- 1 dok 1 dok 1 dok	1	DPA Perubahan 2024			v			
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	I II III IV	3 Dok 6 Dok 9 Dok 12 Dok	1	Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	v	v	v	v		
									Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	I II III IV	4 Dok 4 dok 5 dok 5 dok	1 2 3 4	Evaluasi Renja TW IV 2023 Lkj Tahun 2023 LPPD-LKPU Tahun 2023 Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2023	v	v		v		
									Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase layanan administrasi keuangan										
									Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	I II III IV	3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 12 Bulan	1	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	v	v	v	v		
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	I II III IV	20 lembaga 29 lembaga - -	1	Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan	v	v				
									Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	I II III IV	3 Dok 6 Dok 9 Dok -	1	Pelaksanaan akuntansi SKPD	v	v	v			
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	I II III IV	4 Lap. 8 Lap. 12 Lap. -	1	Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran	v	v	v			
									Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase keselarasan laporan dan pengelola aset										
									Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	I II III IV	1 lap. 2 lap. - -	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	v	v				
									Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	I	2 Lap.	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	v	v				

Kategori	Sub Kategori	DAFTAR LAYANAN DAERAH		DAFTAR LAYANAN DAERAH					
		II	4 Lap.						
		III	-						
		IV	-						
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi kepegawaian								
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	I	2 org/keg	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	v	v	v	v
		II	6 org/keg						
		III	7 org/keg						
		IV	8 org/keg						
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	I	10 org/keg	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	v	v	v	v
		II	20 org/keg						
		III	70 org/keg						
		IV	113 org/keg						
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	I	1 org/keg	1	Bimtek dan Sosialisasi bagi ASN	v	v		
		II	2 org/keg						
		III	-						
		IV	-						
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi umum								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	I	3 paket	1	Pengadaan alat penerangan kantor/ alat listrik	v	v	v	v
		II	6 paket						
		III	9 paket						
		IV	12 paket						
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	I	3 paket	1	Pengadaan peralatan rumah tangga	v	v	v	v
		II	6 paket						
		III	9 paket						
		IV	12 paket						
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	I	3 paket	1	Pengadaan barang cetak dan penggandaan	v	v	v	v
		II	6 paket						
		III	9 paket						
		IV	12 paket						
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	I	3 paket	1	Pengadaan bahan/ material	v	v	v	v
		II	6 paket						
		III	9 paket						
		IV	12 paket						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	I	15 lap.	1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	v	v	v	v
		II	30 lap.						
		III	45 lap.						
		IV	60 lap.						
Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	I	3 lap.	1	Pembayaran langganan listrik, air dan telephone	v	v	v	v
		II	6 lap.						
		III	9 lap.						
		IV	12 lap.						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	I	3 bulan	1	Pembayaran honorarium PTHL dan Tenaga Kebersihan	v	v	v	v
		II	6 bulan						
		III	9 bulan						
		IV	12 bulan						
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	I	1 unit	1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	v	v	v	v
		II	3 unit						
		III	5 unit						
		IV	-						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	I	4 Unit	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	v	v	v	v
		II	8 Unit						

EVALUASI RENCANA AKSI BADAN KESBANG DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2024

No	SASARAN					PROGRAM					KEGIATAN						AKSI				JADWAL PELAKSANAAN			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/ TW	REALISASI/ TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/ TW	REALISASI / TW	AKSI KEGIATAN	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	1	15%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	10%	8%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah													
										Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1	4 Dok	3 Dok	1 2 3 4 5 6	Renja 2023 Rencana Aksi 2023 RUA PPAS 2023 Anggaran Reponsif Gender (ARG) Perubahan Renja 2023 Perubahan Rencana Aksi 2023	v	v	v	v				
										Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	1 Dok	1 Dok	1	RKA Tahun 2024	v							
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	-	-	1	RKA Perubahan 2023			v					
										Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD	1	-	-	1	DPA Tahun 2024				v				
										Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	-	-	1	DPA Perubahan Tahun 2023				v				
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	3 Dok	3 dok	1	Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	v	v	v	v				
										Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	4 Dok	4 Dok	1 2 3 4	Evaluasi Renja TW IV 2023 LKJ Tahun 2023 LPPD-LKPJ Tahun 2023 Evaluasi Renja Tahun 2023	v	v	v	v				
										Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi keuangan													
										Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1	3 Bulan	3 Bulan	1	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	v	v	v	v				
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	1	20 lembaga	2 lembaga	1	Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan		v	v					
										Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1	3 Dok	3 Dok	1	Pelaksanaan akuntansi SKPD	v	v	v	v				
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1	4 Lap.	3 Lap.	1	Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran	v	v	v	v				
										Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset													
										Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	1 lap.	1 lap.	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	v			v				
										Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	2 Lap.	2 Lap.	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	v	v	v	v				
										Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi kepegawaian													
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	20 org/keg	-	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	v	v	v	v				
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	10 org/keg	2 org/keg	1	Bimtek dan Sosialisasi bagi ASN	v	v	v	v				
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	10 org/keg	-	1	Bimtek dan Sosialisasi bagi ASN	v	v	v	v				
										Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi umum													
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	3 paket	2 paket	1	Pengadaan alat penerangan kantor/ alat listrik	v	v	v	v				

									Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	II	-	-	1	pengadaan perlengkapan kantor			v		
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	I	3 paket	3 paket	1	Pengadaan peralatan rumah tangga	v	v	v	v	
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	I	3 paket	3 paket	1	Pengadaan barang cetak dan penggandaan	v	v	v	v	
									Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	I	3 paket	3 paket	1	Pengadaan bahan/ meterial	v	v	v	v	
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	I	15 lap.	12 lap.	1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	v	v	v	v	
									Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah										
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	I	3 lap.	3 lap.	1	Pembayaran langganan listrik, air dan telephone	v	v	v	v	
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	I	3 Bulan	3 Bulan	1	Pembayaran honorarium PTHL dan Tenaga Kebersihan	v	v	v	v	
									Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah										
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	I	1 unit	1 unit	1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	v	v	v	v	
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	I	4 Unit	2 unit	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	v	v	v	v	
									Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	I	5%	2%		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan				
									Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	I	3 dok	-	1	Program Kerja PPWK	v				
														2	Program Kerja GNRM	v				
														3	Program Kerja FPK	v				
									Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	I	-	-	1	Bela Negara bagi Tokoh Pemuda dan Ormas Keperempuanan dalam Rangka Pencegahan Radikalisme dan Ekstremisme				v	
														2	Revitalisasi & Aktualisasi Pancasila				v	
														3	Sosialisasi Bela Negara				v	
														4	Sosialisasi GNRM				v	
									Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	I	-	-	1	Rakor Bela Negara, Karbang, BTI dan Kewarganegaraan				v	
														2	Rapat Kerja PPWK				v	
														3	Rapat Kerja GNRM				v	
														4	Rapat Kerja FPK				v	
									Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaliasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	I	4 lap.	-	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	v	v	v	v	
									Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	I	160 org	-	1	Rapat seleksi			v		
														2	Diklat Kegiatan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Duta Pancasila Purna Paskibraka	v				
														3	Upacara Hari Bela Negara				v	
														4	Upacara Hari Lahir Pancasila			v		

EVALUASI RENCANA AKSI BADAN KESBANG DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2024

No	SASARAN					PROGRAM					KEGIATAN					AKSI				JADWAL PELAKSANAAN			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/ TW	REALISASI/ TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/ TW	REALISASI / TW	AKSI KEGIATAN	I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	II	25%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	II	5%	5%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	II	-	1 Dok	1 Renja 2023	v							
									Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah					2 Rencana Aksi 2023	v							
															3 RUA PPAS 2023	v							
															4 Anggaran Reponsif Gender (ARG)	v							
															5 Perubahan Renja 2023				v				
															6 Perubahan Rencana Aksi 2023				v				
									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	II	-	-	1 RKA Tahun 2024	v								
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	II	-	-	1 RKA Perubahan 2024				v					
									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD	II	-	-	1 DPA Tahun 2024				v					
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	II	-	-	1 DPA Perubahan Tahun 2024				v					
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	II	3 Dok	3 dok	1 Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	v	v	v	v					
									Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	II	4 Dok	3 Dok	1 Evaluasi Renja TW IV 2023	v								
														2 LKJ Tahun 2023	v								
														3 LPPD-LKPJ Tahun 2023	v								
														4 Evaluasi Renja Tahun 2023	v	v	v	v					
									Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi keuangan													
									Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	II	3 Bulan	3 Bulan	1 pembayaran gaji dan tunjangan ASN	v	v	v	v					
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	II	10 lembaga	0 lembaga	1 Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan		v	v						
									Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	II	3 Dok	2 Dok	1 Pelaksanaan akuntansi SKPD	v	v	v	v					
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	II	6 Lap.	4 Lap.	1 Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran	v	v	v	v					
									Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset													
									Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	II	1 lap.	1 lap.	1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	v			v					
									Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	II	2 Lap.	2 Lap.	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	v	v	v	v					
									Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi kepegawaian													
									Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	II	-	-	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	v	v	v	v					
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	II	30 org/keg	30 org/keg	1 Bimtek dan Sosialisasi bagi ASN	v	v	v	v					
									Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	II	-	-	1 Bimtek dan Sosialisasi bagi ASN	v	v	v	v					
									Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi umum													
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	II	3 paket	4 paket	1 Pengadaan alat penerangan kantor/ alat listrik	v	v	v	v					

									Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	II	-	-	1	pengadaan perlengkapan kantor			v		
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	II	3 paket	3 paket	1	Pengadaan peralatan rumah tangga	v	v	v	v	
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	II	3 paket	3 paket	1	Pengadaan barang cetak dan penggandaan	v	v	v	v	
									Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	II	3 paket	3 paket	1	Pengadaan bahan/ meterial	v	v	v	v	
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	II	15 lap.	15 lap.	1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	v	v	v	v	
									Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah										
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	II	3 lap.	2 lap.	1	Pembayaran langganan listrik, air dan telephone	v	v	v	v	
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	II	3 Bulan	3 Bulan	1	Pembayaran honorarium PTHL dan Tenaga Kebersihan	v	v	v	v	
									Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah										
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	II	2 unit	1 unit	1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	v	v	v	v	
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	II	10 Unit	10 Unit	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	v	v	v	v	
									Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	II	5%	5%		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan				
									Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	II	1 dok	-	1	Program Kerja PPWK	v				
														2	Program Kerja GNRM	v				
														3	Program Kerja FPK	v				
									Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	II	-	-	1	Bela Negara bagi Tokoh Pemuda dan Ormas Keperempuanan dalam Rangka Pencegahan Radikalisme dan Ekstremisme				v	
														2	Revitalisasi & Aktualisasi Pancasila				v	
														3	Sosialisasi Bela Negara				v	
														4	Sosialisasi GNRM				v	
									Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	II	-	-	1	Rakor Bela Negara, Karbang, BTI dan Kewarganegaraan				v	
														2	Rapat Kerja PPWK				v	
														3	Rapat Kerja GNRM				v	
														4	Rapat Kerja FPK				v	
									Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evalhuasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	II	3 lap.	3 lap.	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	v	v	v	v	
									Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	II	-	-	1	Rapat seleksi				v	
														2	Diklat Kegiatan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Duta Pancasila Purna Paskibraka	v				
														3	Upacara Hari Bela Negara				v	
														4	Upacara Hari Lahir Pancasila				v	

										Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	II	3 lap.	2 lap.	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	v	v	v	
										Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	II	-	-	1	Rakor Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Pembangunan Berkelanjutan Di Provinsi Lampung	v			
2	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	II	25	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	II	5%	5%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Tulis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik									
										Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	II	-	-	1	Penyusunan Program Kerja	v			
										Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	II	100 org	-	1	Posko Pemilu Serentak	v			
															2	Posko Pilkada			v	
															3	FGD IDI			v	
															4	Sosialisasi Pemilu/ Pilkada			v	v
															5	Rakor Pilkada			v	v
										Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	II	50 orang	50 orang	1	Pembinaan Kpd Farpol			v	
															2	Silaturahmi dan Penandatanganan BA Serah Terima				v
															3	Rapat Tim Banpol				v
										Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	II	3 Lap.	4 Lap.	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	v	v	v	v

EVALUASI RENCANA AKSI BADAN KESBANG DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2024

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				AKSI				JADWAL PELAKSANAAN			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	REALISASI/TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	REALISASI/TW	AKSI KEGIATAN	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	III	30%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	III	35%	35%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah									
										Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	III			1 Renja 2023	v				
															2 Rencana Aksi 2023	v				
															3 RUA PPAS 2023	v				
															4 Anggaran Reponsif Gender (ARG)	v				
															5 Perubahan Renja 2023				v	
															6 Perubahan Rencana Aksi 2023				v	
										Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	III			1 RKA Tahun 2024	v				
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	III	1 dok	1 dok	1 RKA Perubahan 2024				v	
										Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD	III			1 DPA Tahun 2024				v	
										Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	III			1 DPA Perubahan Tahun 2024				v	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	III	3 Dok	3 dok	1 Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	v	v	v	v	
										Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	III	4 Dok	5 Dok	1 Evaluasi Renja TW IV 2023	v				
															2 LKJ Tahun 2023	v				
															3 LPPD-LKPJ Tahun 2023	v				
															4 Evaluasi Renja Tahun 2023	v	v	v	v	
										Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi keuangan									
										Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	III	3 Bulan	3 Bulan	1 pembayaran gaji dan tunjangan ASN	v	v	v	v	
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	III		10 lembaga	1 Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan				v	
										Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	III	3 Dok	3 Dok	1 Pelaksanaan akuntansi SKPD	v	v	v	v	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	III	4 Lap.	5 Lap.	1 Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran	v	v	v	v	
										Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset									
										Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	III	1 lap.	1 lap.	1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	v			v	
										Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	III	2 Lap.	2 Lap.	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	v	v	v	v	
										Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi kepegawaian									
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	III	6 org/keg		1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	v	v	v	v	
										Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	III	40 org/keg	33 org/keg	1 Bimtek dan Sosialisasi bagi ASN	v	v	v	v	
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	III	1 org/keg	1 org/keg	1 Bimtek dan Sosialisasi bagi ASN	v	v	v	v	
										Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi umum									
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	III	3 paket	3 paket	1 Pengadaan alat penerangan kantor/ alat listrik	v	v	v	v	
										Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	III			1 pengadaan perlengkapan kantor				v	

									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	III	3 paket	3 paket	1	Pengadaan peralatan rumah tangga	v	v	v	v	
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	III	3 paket	3 paket	1	Pengadaan barang cetak dan penggandaan	v	v	v	v	
									Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	III	3 paket	2 paket	1	Pengadaan bahan/ material	v	v	v	v	
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	III	15 lap.	18 lap.	1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	v	v	v	v	
									Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah										
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	III	3 lap.	4 lap.	1	Pembayaran langganan listrik, air dan telephone	v	v	v	v	
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	III	3 Bulan	3 Bulan	1	Pembayaran honorarium PTHL dan Tenaga Kebersihan	v	v	v	v	
									Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah										
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	III	2 unit	1 unit	1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	v	v	v	v	
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	III	10 Unit	15 Unit	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	v	v	v	v	
									Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	III	10%	10%		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan				
									Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	III	-	-	1	Program Kerja PPWK	v				
														2	Program Kerja GNRM	v				
														3	Program Kerja FPK	v				
									Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	III	-	-	1	Bela Negara bagi Tokoh Pemuda dan Ormas Kepemudaan dalam Rangka Pencegahan Radikalisme dan Ekstremisme				v	
														2	Revitalisasi & Aktualisasi Pancasila				v	
														3	Sosialisasi Bela Negara				v	
														4	Sosialisasi GNRM				v	
									Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	III	-	-	1	Rakor Bela Negara, Karbang, BTI dan Kewarganegaraan				v	
														2	Rapat Kerja PPWK				v	
														3	Rapat Kerja GNRM				v	
														4	Rapat Kerja PPK				v	
									Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	III	3 lap.	3 lap.	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	v	v	v	v	
									Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	III	33 orang	33 orang	1	Rapat seleksi		v			
														2	Didat Kegiatan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Duta Pancasila Purna Paskibraka	v				
														3	Upacara Hari Bela Negara				v	
														4	Upacara Hari Lahir Pancasila		v			
														5	Rapat Didat Paskibraka 17 Agustus				v	
														6	Pengukuhan Paskibraka				v	

										Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	III	6 lap.	3 lap.	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	v	v	v			
										Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	III	-	2 dok	1	Rakor Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Pembangunan Berkelanjutan Di Provinsi Lampung	v					
2	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	III	15	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Prosentase partisipasi pemilik dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	III	10%	10%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teman Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik											
										Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	III	-	-	1	Penyusunan Program Kerja	v					
										Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	III	285 org	200 orang	1	Posko Pemilu Serentak	v					
															2	Posko Pilkada			v			
															3	FGD IDI			v			
															4	Sosialisasi Pemilu/Pilkada			v	v		
															5	Rakor Pilkada			v	v		
										Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	III	100 orang	-	1	Pembinaan Kpd Farpol			v			
															2	Silaturahmi dan Penandatanganan BA Serah Terima				v		
															3	Rapat Tim Banpol				v		
										Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	III	6 Lap.	6 Lap.	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	v	v	v	v		

EVALUASI RENCANA AKSI BADAN KESBANG DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2024

No	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN						AKSI				JADWAL PELAKSANAAN			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/ TW	REALISASI/ TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/ TW	REALISASI/ TW	AKSI KEGIATAN	I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	IV	30%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IV	30%	30%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah												
										Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	IV	1 dok	2 dok	1 Renja 2023	v							
															2 Rencana Aksi 2023	v							
															3 RUA PPAS 2023	v							
															4 Anggaran Reponsif Gender (ARG)	v							
															5 Perubahan Renja 2023				v				
															6 Perubahan Rencana Aksi 2023				v				
										Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	IV	-	-	1 RKA Tahun 2024	v							
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	IV	-	-	1 RKA Perubahan 2024				v				
										Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD	IV	1 dok	1 dok	1 DPA Tahun 2024				v				
										Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	IV	1 dok	1 dok	1 DPA Perubahan Tahun 2024				v				
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	IV	3 Dok	3 dok	1 Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	v	v	v	v				
										Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	IV	2 Dok	2 Dok	1 Evaluasi Renja TW IV 2023	v							
															2 LKJ Tahun 2023	v							
															3 LPPD-LKPJ Tahun 2023	v							
															4 Evaluasi Renja Tahun 2023	v	v	v	v				
										Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi keuangan												
										Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	IV	3 Bulan	3 Bulan	1 pembayaran gaji dan tunjangan ASN	v	v	v	v				
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	IV	8 lembaga	8 lembaga	1 Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan				v				
										Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	IV	3 Dok	4 Dok	1 Pelaksanaan akuntansi SKPD	v	v	v	v				
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	IV	4 Lap.	6 Lap.	1 Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran	v	v	v	v				
										Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset												
										Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	IV	1 lap.	1 lap.	1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	v			v				
										Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	IV	2 Lap.	2 Lap.	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	v	v	v	v				
										Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi kepegawaian												
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	IV	-	7 org/keg	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	v	v	v	v				
										Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	IV	33 org/keg	30 org/keg	1 Bimtek dan Sosialisasi bagi ASN	v	v	v	v				
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	IV	1 org/keg	-	1 Bimtek dan Sosialisasi bagi ASN	v	v	v	v				
										Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi umum												
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	IV	3 paket	3 paket	1 Pengadaan alat penerangan kantor/ alat listrik	v	v	v	v				
										Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	IV	3 paket	3 paket	1 pengadaan perlengkapan kantor				v				

									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	IV	3 paket	3 paket	1	Pengadaan peralatan rumah tangga	v	v	v	v	
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	IV	3 paket	3 paket	1	Pengadaan barang cetak dan penggandaan	v	v	v	v	
									Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	IV	3 paket	4 paket	1	Pengadaan bahan/ material	v	v	v	v	
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IV	15 lap.	15 lap.	1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	v	v	v	v	
									Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah										
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	IV	3 lap.	3 lap.	1	Pembayaran langganan listrik, air dan telephone	v	v	v	v	
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	IV	3 Bulan	3 Bulan	1	Pembayaran honorarium PTHL dan Tenaga Kebersihan	v	v	v	v	
									Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah										
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	IV	2 unit	4 unit	1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	v	v	v	v	
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	IV	6 Unit	3 Unit	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	v	v	v	v	
									Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	IV	10%	10%		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan				
									Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	IV	-	-	1	Program Kerja PPWK	v				
														2	Program Kerja GNRM	v				
														3	Program Kerja FPK	v				
									Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	IV	60 orang	60 orang	1	Bela Negara bagi Tokoh Pemuda dan Ormas Kepemudaan dalam Rangka Pencegahan Radikalisme dan Ekstremisme				v	
														2	Revitalisasi & Aktualisasi Pancasila				v	
														3	Sosialisasi Bela Negara				v	
														4	Sosialisasi GNRM				v	
									Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	IV	60 orang	60 orang	1	Rakor Bela Negara, Karbang, BTI dan Kewarganegaraan				v	
														2	Rapat Kerja PPWK				v	
														3	Rapat Kerja GNRM				v	
														4	Rapat Kerja PPK				v	
									Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	IV	4 lap.	4 lap.	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	v	v	v	v	
									Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	IV	-	-	1	Rapat seleksi				v	
														2	Didat Kegiatan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Duta Pancasila Purna Paskibraka	v				
														3	Upacara Hari Bela Negara				v	
														4	Upacara Hari Lahir Pancasila		v			
														5	Rapat Didat Paskibraka 17 Agustus				v	
														6	Pengukuhan Paskibraka				v	

									Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	IV	4 lap.	2 lap.	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	v	v	v	
									Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	IV	-	-	1	Rakor Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Pembangunan Berkelanjutan Di Provinsi Lampung	v			
2	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	IV	15	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Prosentase partisipasi pemilik dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	IV	10%	5%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Tahunan Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik								
									Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	IV	-	-	1	Penyusunan Program Kerja	v			
									Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	IV	-	137 orang	1	Posko Pemilu Serentak	v			
									Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	IV	-	-	1	Pembinaan Kpd Farpol		v		
									Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	IV	4 Lap.	5 Lap.	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	v	v	v	v
														2	Posko Pilkada			v	
														3	FGD IDI			v	
														4	Sosialisasi Pemilu/Pilkada			v	v
														5	Rakor Pilkada			v	v
														2	Silaturahmi dan Penandatanganan BA Serah Terima				v
														3	Rapat Tim Banpol				v

BAB III

P E N U T U P

Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan Sasaran, Indikator Sasaran, serta target kinerja dan kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja.

Hasil Evaluasi terkait capaian indikator sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat diketahui bahwa dari 2 indikator sasaran utama dan 2 indikator sasaran pendukung pencapaiannya sudah cukup baik yang dapat dilihat dari capaian kinerja IKU prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung sebesar 100% dan capaian kinerja IKU Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih sebesar 99,10%.

Secara umum capaian kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung tahun anggaran 2024 telah tercapai dengan baik. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung.
2. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung khususnya bidang Intelijen dan Deteksi Dini, Cegah Dini dan penanganan Konflik Sosial di Provinsi Lampung.
3. Meningkatkan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan

kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional di Provinsi Lampung

4. Meningkatkan pelaksanaan monitoring bidang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional di Provinsi Lampung.

Demikian Dokumen Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tahun 2024 ini dibuat sebagai informasi yang bermanfaat dalam penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung maupun sebagai pertimbangan perumusan kebijakan dan program yang lebih terarah dan terpadu pada tahun anggaran yang akan datang.

Bandar Lampung, Februari 2025

KEPALA BADAN,



Dr. SENEN MUSTAKIM., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680602 199303 1 006